



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 6-10 DESEMBER 2023**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR NAMA DAN JADWAL KEGIATAN	3
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II LAPORAN KUNJUNGAN KERJA	8
BAB III PENUTUP	15



**DAFTAR NAMA
KUNKER RESES KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI
SULAWESI SELATANMASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2023 - 2024**

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANGG				
1.	A-516	Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.	Ketua Tim	PAN	SULSEL I
2.	A-231	I.G. NGURAH KESUMA KELAKAN,S.T., M.Si	Anggota	PDIP	BALI
3.	A-236	H.RACHMAT HIDAYAT, S.H	Anggota	PDIP	NTB II
4.	A-255	MATINDAS J RUMAMBI	Anggota	PDI P	SULTENG
5.	A-257	Drs. H. SAMSU NIANG, M.P.d	Anggota	PDIP	SULSEL II
6.	A-272	H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., MH.	Anggota	GOLKAR	SUMBAR II
7.	A-280	MOHAMMAD SALEH, S.E	Anggota	GOLKAR	BENGKULU
8.	A-136	YAN PERMENAS MENDENAS, S.Os., M.Si	Anggota	GERINDA	PAPUA
9.	A-121	Drs. H. ZAINUL ARIFIN	Anggota	GERINDA	NTB I
10.	A-351	DELMERIA	Anggota	NASDEM	SUMUT II
11.	A-377	ACH. FADIL MUZAKKI SYAH, S.Pd	Anggota	NASDEM	JATIM III
12.	A-34	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag	Anggota	PKB	JATIM II
13.	A-564	Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc	Anggota	DEMOKRAT	NTB II
14.	A-559	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP	Anggota	DEMOKRAT	JATIM XI
15.	A-413	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A	Anggota	PKS	SUMUT II
16.	A-519	FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E	Anggota	PAN	SULTRA
17.	-	AGUS WIDIJATMOKO	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
18.	-	RIZZA BIMA PERMATA	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
19.	-	ANTON SYAFRIUNI	TENAGA AHLI SEKRETARIAT KOMISI VIII		
20.	-	ADI WICAKSONO	TENAGA AHLI SEKRETARIAT KOMISI VIII		
21.	-	ARDIANSYAH AZIS	TENAGA AHLI SEKRETARIAT KOMISI VIII		
22.	-	SAFITRI RESTU WIDYOWATI	MEDIA SOSIAL DPR RI		

**JADWAL KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI SULAWESI
SELATAN MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 – 2024**

NO.	HARI/TANGGAL	ACARA	KETERANGAN
Rabu, 6 Desember 2023			
	Pkl. 04.20 WIB	Anggota Tim Kunker Reses sudah berkumpul di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Terminal 3, Gate 5.	Check-in 1 (satu) jam sebelum keberangkatan
	Pkl. 05.20 WIB	Take Off dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Sultan Hasanudin, Maros, Prov. Sulawesi Selatan	Dengan Pesawat GA 640
	Pkl. 08.55 WITA	Tiba Di Bandara Sultan Hasanudin, Maros, Prov. Sulawesi Selatan.	Penjemputan oleh Protokol
	Pkl.09.00–09.30 WITA	Perjalanan menuju Kanwil Agama Prov. Sulawesi Selatan.	Dikoordinasikan oleh Protokol Kanwil Agama. Mobil Patwal dan Anggota.
	Pkl.09.30 – 10.00 WITA	Sarapan di Kantor Kanwil Agama Prov. Sulawesi Selatan.	Dikoordinasikan oleh Protokol Kemenag Prov. Sulawesi.
	Pkl. 10.00 – 12.00 WITA	Pertemuan Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI dengan Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, Kankemenag Kab./Kota, Kepala UPT Asrama Haji, Kepala BPKH Tema: Sosialisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H /2024 M.	Dikoordinasikan oleh Protokol Kemenag Prov. Sulawesi Selatan. Pertemuan di Aula Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Selatan.
	Pkl.12.00 – 13.30 WITA	ISHOMA Bersama Jajaran Kemenag RI	
	Pkl. 13.30 – 14.00	Perjalanan menuju Kantor BBPPKS Makassar	
	14.00-16.00	Kunjungan ke Kantor BBPPKS Makasar Provinsi Sulawesi Selatan. Dilanjutkan dengan penyerahan Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI secara simbolis kepada KPM.	
Kamis, 7 Desember 2023			
	Pkl. 09.00 – 11.00 WITA	Pertemuan Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI Bersama Badan Penanggulangan Bencana	

	Daerah (BPBD) Prov. Sulawesi Selatan.:	
	Tema: Penanganan Kebencanaan dan Mitigasi Bencana di Prov. Sulawesi Selatan.	
	Dilanjutkan Penyerahan Bantuan Paket Sembako dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).	
11.10 - 12.30 WITA	Makan Siang	Protokol
13.30 WITA	Kembali Ke Hotel	Protokol dan Setkom VIII DPR RI
Jum'at, 8 Desember 2023		
07.00-09.00	Sarapan Pagi di Hotel	
10.00-11.00	Kunjungan Asrama Haji Makassar	
12.00-14.00	Sholat Jum'at	
14.00	Makan Siang	
15.00	Kembali ke Hotel	
Sabtu, 9 Desember 2023		
07.00-09.00	Sarapan di Hotel	
10.00-12.00	Pengumpulan dan Pembahasan bahan-bahan kunjungan kerja ke Mitra Komisi VIII DPR RI	
13.00	Makan Siang	
14.00	Kembali Ke Hotel	
Minggu, 10 Desember 2023		
07.00-08.00	Sarapan Pagi	
09.50	Take off ke Jakarta	
	Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng	

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI dalam Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 telah membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja Spesifik, yaitu : Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kunjungan kerja Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ini didasarkan atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 01/DPR RI/ 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 59 Ayat (4) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
3. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 - a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan masyarakat dalam bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana serta Pengelolaan Keuangan Haji.
 - b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

2. Tujuan

- a. Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana serta Pengelolaan Keuangan Haji di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelaksanaan program-program bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana serta Pengelolaan Keuangan Haji.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan Masa Reses Persidangan Tahun 2023-2024 dilaksanakan pada tanggal 6-10 Desember 2023.

E. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Objek kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 adalah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar dan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB. II

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI

Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI masa reses persidangan II tahun 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Selatan diawali dengan pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala UPT Asrama Haji Makassar, dan perwakilan KUA dan Penyuluh Agama. Tema pembahasan adalah persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024m/1445H.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah mewajibkan Pemerintah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji. Kewajiban memberikan pelayanan yang baik bagi jemaah haji dengan menganut asas keadilan sesuai hak yang dimiliki oleh jemaah haji, profesional melalui prinsip nirlaba yaitu mementingkan pelayanan daripada mencari keuntungan. Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama telah membahas dan menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2024M/1445H rata-rata per jemaah sebesar Rp93.410.286,- turun dari usulan Pemerintah sebesar Rp.105.095.032,-. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) jemaah haji rata-rata sebesar Rp56.046.172,- atau sebesar 60% dan pembiayaan yang bersumber dari nilai manfaat sebesar Rp37.364.114,- atau sebesar 40%.



Diharapkan dengan lebih awalnya pengesahan BPIH persiapan penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih baik sesuai tujuan dalam undang-undang yaitu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023M/1444H diharapkan untuk diperbaiki dan tidak terulang Kembali dengan melakukan perencanaan yang lebih baik, antisipasi kondisi jalan keluar dari setiap permasalahan yang akan muncul, petugas haji yang berkualitas, dan pengawasan yang ketat dalam setiap pelayanan terhadap jemaah haji selama di Arab Saudi. Khusus terkait kekurangan selama puncak haji Arafah-Muzdalifah-Mina Pemerintah diharapkan berhati-hati dengan MoU dengan syarikah yang akan dipilih untuk melakukan pelayanan terhadap jemaah haji.

Dalam pertemuan tersebut dapat dicatat sebagai berikut:

1. Sosialisasi BPIH terhadap calon jemaah haji yang dalam sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (siskohat) berangkat tahun 2024 mengenai sistem pembayaran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) dapat mencicil dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan Kesehatan sebagai syarat istita'ah Kesehatan haji.
2. Penyampaian informasi yang cepat tentang keberangkatan kepada calon jemaah haji yang akan berangkat tahun 2024 beserta jemaah haji cadangan.
3. Kuota Petugas haji Indonesia mendapatkan kenaikan menjadi 4.421 dari sebelumnya 2.210 orang.
4. Calon petugas haji diharapkan memiliki kemampuan teknis penyelenggaraan ibadah haji, bahasa arab, manasik haji dan sertifikasi.
5. Asrama Haji Makassar untuk mempersiapkan lebih baik seluruh sarana akomodasi jemaah haji yang akan di gunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
6. Masa tunggu jemaah haji di Provinsi Sulawesi Selatan bervariasi paling rendah 23 tahun di Kabupaten Luwu dan tertinggi 47 tahun di kabupaten Bantaeng dengan kuota setiap tahun 7.272. setiap tahun jemaah haji yang mendaftar pada tahun 2019 sebanyak 13.228 orang, 2020 sebanyak 12.962 orang, tahun 2021 sebanyak 6.836 orang, tahun 2022 sebanyak 7.696 orang dan tahun 2023 sebanyak 8.497 orang.

Pertemuan di Kantor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud dari Upaya mencapai tujuan bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial. Pengaturan hukum terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemerintah telah memiliki Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Bantuan Iuran Kesehatan (PBI), Program Atensi, Program Rehabilitasi, dan berbagai program bantuan sosial lainnya. Diharapkannya masyarakat yang tergolong belum mampu mandiri kesejahteraannya dapat jaminan sosial melalui program tersebut sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya.

Dalam pertemuan di BBPPKS Makassar dapat dicatat sebagai berikut:

1. Verifikasi dan validasi data untuk dapat dilakukan secara berkala dengan melakukan pengawasan yang ketat.
2. Anggaran cadangan program keluarga harapan untuk kategori keluarga yang belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial perlu segera dilakukan. Karena masih terdapat keluarga yang tidak masuk dalam sistem DTKS.
3. Peningkatan sarana dan prasarana BBPPKS Makassar untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat.
4. Peningkatan koordinasi perencanaan anggaran program kesejahteraan sosial antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat untuk efektifitas tercapainya target sasaran dan tercapai tujuan kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan operasional tenaga pendamping dan kualitas tenaga pendamping bagi program keluarga harapan.
6. Pengawasan terhadap penyaluran PKH dan BPNT sehingga tidak ada lagi penerima yang gagal mendapatkan haknya.



Pertemuan di Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

Secara geografis wilayah Negara Indonesia terletak pada tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudera Pasifik. Sebagai episentrum yang disertai dengan banyaknya gunung berapi aktif dan hujan yang sangat tinggi, hampir semua potensi bencana terdapat di Indonesia.

Bencana tersebut antara lain disebabkan oleh daya rusak air seperti banjir termasuk banjir bandang, erosi dan sedimentasi, tanah longsor, dan banjir lahar dingin. Bencana akibat daya rusak air dapat menyebabkan sawah tergenang, tertimbun, meluluh-lantakkan perumahan dan permukiman masyarakat, merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan banyak menelan korban jiwa, dan merusak lingkungan.

Alam yang kaya, jumlah penduduk yang banyak dengan penyebaran tidak merata serta ketimpangan sosial dan lain-lain masalah penyimpangan pemanfaatan kekayaan alam dapat meningkatkan eskalasi dan macam bencana, tidak lagi bersumber dari gejala alam tapi juga berkaitan dengan ulah tingkah manusia. Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun ulah manusia seperti: badai, kekeringan, gelombang pasang, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan bencana akibat kegagalan bangunan, kecelakaan industri serta kesalahan teknologi, telah mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia.



Selama ini penanggulangan bencana baik karena alam maupun ulah manusia telah diupayakan untuk ditangani dengan berbagai cara dengan melibatkan semua komponen Masyarakat. Salah satu aspek penting timbulnya korban jiwa dan kerusakan/kerugian pada beberapa aspek, adalah kekurang siap-siagaan masyarakat dan aparat/ pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana.

Tujuan dalam penanggulangan bencana yang termaktub dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam pertemuan dengan kepala BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dicatat sebagai berikut :

1. Provinsi Sulawesi Selatan termasuk kategori risiko tinggi terhadap ancaman bencana.
2. Kejadian bencana dari bulan januari sampai November 2023 mencapai 891 bencana.
3. Pentingnya kepastian anggaran terhadap rencana penanggulangan bencana dan alokasi cadangan anggaran untuk penanggulangan bencana.
4. Peningkatan sarana dan prasarana seperti Gedung pusat kontrol penanggulangan bencana.
5. Kesiapsiagaan petugas dan relawan terhadap potensi bencana dengan pelatihan dan pengetahuan serta pengalaman yang ditopang dengan alat serta teknologi yang modern.
6. Koordinasi perencanaan Pembangunan dan peta risiko bencana di daerah untuk lebih ditingkatkan agar mengantisipasi terhadap dampak risiko bencana yang akan terjadi.

Rekomendasi

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI memberikan rekomendasi yaitu:

Kepada Kementerian Agama:

1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan diminta untuk segera melakukan sosialisasi kepada seluruh calon jemaah haji tahun 2024 beserta

Cadangan jemaah haji tahun 2024 agar jemaah haji dapat mempersiapkan diri dengan baik.

2. Untuk optimalisasi penyerapan kuota haji dan menghindari porsi batu jemaah haji Kementerian Agama melakukan komunikasi intensif kepada jemaah haji melalui Kantor Urusan Agama Haji di Kecamatan dan melalui media komunikasi yang efektif.
3. Mengupayakan kuota tambahan untuk daerah dengan jemaah haji antrian terlama.
4. Meningkatkan anggaran sosialisasi, manasik haji dan anggaran peningkatan bagi asrama haji.

Kepada Kementerian Sosial:

1. Mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana BBPPKS Makassar agar mampu meningkatkan kualitas layanan bagi Masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan PKH, BPNT, Atensi dan bantuan lainnya sebagai Upaya efektifitas dan tercapainya tujuan.
3. Meningkatkan anggaran operasional pendamping PKH.
4. Melakukan sosialisasi, komunikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan PKH dan BPNT.
5. Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait verifikasi dan validasi DTKS bagi Masyarakat yang belum masuk DTKS.

Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana:

1. Memberikan segera pencairan dana bantuan siap pakai yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan melakukan pengawasan terhadap penyalurannya.
2. Memberikan program dukungan bagi sarana dan prasarana khususnya Gedung pusat control penanggulangan bencana di Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Daerah terhadap potensi risiko bencana setiap saat dan perencanaan Pembangunan daerah yang selaras dengan peta risiko bencana.

BAB III
PENUTUP

Demikianlah laporan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI masa reses persidangan tahun 2023-2023, untuk dapat dijadikan bahan masukan terhadap rapat-rapat dengan Pemerintah.